

TOLERANSI KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DI BALI DALAM PERAYAAN HARI RAYA NYEPI PADA AWAL ABAD XXI

TOLERANCE OF RELIGIOUS LIFE IN BALI IN THE CELEBRATION OF NYEPI DAY AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY

Joshua Jolly Sucanta Cakranegara

Alumnus Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

joshua.jolly.s.c. @mail.ugm.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.47655/widyadewata.v5i1.51>

Diterima: 31 Januari 2022 | Direvisi: 27 Februari 2022 | Disetujui: 30 April 2022

Abstrak

Satu hari raya besar yang menjadi keunikan tersendiri di Bali adalah hari raya Nyepi untuk merayakan pergantian tahun Saka oleh umat Hindu. Konsekuensinya adalah penghentian seluruh aktivitas masyarakat, baik umat Hindu maupun umat beragama lain di Bali. Oleh sebab itu, sebuah bentuk pengertian bersama (toleransi) dibutuhkan agar kehidupan umat beragama di Bali tetap berlangsung harmonis. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan memaparkan bentuk-bentuk toleransi atas kehidupan umat beragama di Bali dalam perayaan hari raya Nyepi pada awal abad ke-21. Metode penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa surat kabar sezaman dan surat keputusan atau publikasi resmi pemerintah serta sumber sekunder berupa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang periode ini, beberapa kali hari raya Nyepi bertepatan dengan hari Jumat sebagai hari beribadah umat Islam atau hari Minggu sebagai hari beribadah umat Kristiani sehingga membutuhkan bentuk toleransi. Bentuk toleransi yang dicapai adalah tidak digunakannya pengeras suara pada saat azan dan salat Jumat bagi umat Islam dan memindahkan waktu peribadatan ke hari Sabtu bagi umat Kristiani. Meski tidak jarang hal ini menimbulkan konflik, momentum tersebut dapat menjadi sarana merekatkan hubungan antarumat beragama di Bali.

Kata kunci: Hari Raya Nyepi; Toleransi; Umat Hindu; Umat Islam; Umat Kristiani

Abstract

One big holiday that is unique in Bali is the Nyepi day to celebrate the turn of the Saka year by Hindus. The consequence is the cessation of all community activities, both Hindus and people of other religions in Bali. Therefore, a form of mutual understanding (tolerance) is needed so that the life of religious people in Bali continues in harmony. With this background, this article aims to describe the forms of tolerance for religious life in Bali in the celebration of Nyepi at the beginning of the 21st century. This research method is a historical research method using primary sources in the form of contemporary newspapers and decrees or official government publications as well as secondary sources in the form of related literature. The results showed that throughout this period, several times the Nyepi day coincided with Friday as a day of worship for Muslims or Sunday as a day of worship for Christians so that it requires a form of tolerance. The form of tolerance achieved is not using loudspeakers during the call to prayer and Friday prayers for Muslims and moving the time of worship to Saturday for Christians. Although this often leads to conflict, this momentum can be a means of bonding inter-religious relations in Bali.

Keywords: Nyepi Day; Tolerance; Hindus, Islams, Christians

PENDAHULUAN

Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dengan segudang keunikannya. Satu hari raya besar yang menjadi ciri khas di Bali adalah hari raya Nyepi. Fred B. Eiseman (1994, pp. 186–187) menyebut bahwa hari raya ini merupakan peringatan tahun baru Saka oleh umat Hindu yang dimulai sejak 78 Masehi. Nyoman S. Pendit (2001, pp. 43–46) lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat serangkaian upacara/*upakara*, yaitu *melasti* (dua hari sebelum hari raya Nyepi), *tawur kesanga* (sehari sebelum hari raya Nyepi), *Nyepi*, dan *ngembak geni* (satu hari setelah hari raya Nyepi).

Dalam konteks yang lebih luas, Pendit (2001, pp. 190–192) menyebut bahwa hari raya Nyepi merupakan hari yang mengawali tahun toleransi dan kerukunan beragama. Melalui pengheningan diri dengan *catur brata penyepian* (empat tapa penyepian), yaitu *amati geni* (tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api/penerangan), *amati lelunganan* (tidak bepergian), *amati pakaryaan* (tidak bekerja), dan *amati lelangunan* (tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hiburan), hari raya Nyepi mengandung nilai toleransi.

Ia menjelaskan bahwa dalam konteks di Bali maupun di Indonesia dengan beragam agama yang dianut penduduknya, perbedaan dalam pelaksanaan ajaran dan keyakinan merupakan satu fenomena hidup beragama yang perlu dipahami secara wajar. Hal ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dicari kesesuaiannya agar kebersamaan antarumat beragama lebih erat terjalin. Dengan demikian, umat Hindu yang merayakan Nyepi di tengah umat yang berbeda agama turut berkontribusi dalam mengedepankan spirit religius yang lebih manusiawi (Pendit, 2001, pp. 190–192)

Senada dengan hal itu, Gede Mahari Natih (1994, p. 123), seorang cendekiawan Hindu, sebelumnya telah menjelaskan bahwa agama Hindu mempunyai ajaran universal yang memenuhi aspek-aspek, seperti peningkatan keimanan dan ketakwaan, peningkatan pengertian dan pengetahuan agama, serta peningkatan toleransi atau kerukunan hidup beragama. Dengan kata lain, hari raya Nyepi, meski identik dengan ajaran agama Hindu, juga mengandung nilai universalitas tersebut.

Meski merupakan sebuah hari raya besar umat Hindu, salah satu agama yang diakui secara resmi di Indonesia, hari raya ini tidak serta merta menjadi hari libur nasional sejak Indonesia merdeka. Proses yang terbilang alot ini terjadi sejak 1960-an yang diinisiasi oleh Parisada Dharma Hindu Bali (PDHB). Muara dari proses ini adalah Nyepi dinyatakan sebagai hari libur nasional sejak 1983 (Picard, 2020, p. 215).

Hari raya Nyepi dirayakan tidak selalu sama hari dan tanggalnya setiap tahun. Beberapa kali, hari raya ini jatuh pada hari Jumat (hari beribadah umat Islam) atau hari Minggu (hari beribadah umat Kristiani, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik). Oleh sebab itu, dalam beberapa momentum tersebut, dialog antarumat beragama melalui para pemukanya dibangun untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga hari raya Nyepi dapat berlangsung khidmat dan umat beragama lain tetap dapat menjalankan ibadatnya tanpa mengurangi kekhidmatannya. Dengan kata lain, toleransi kehidupan umat beragama di Bali, melalui pengertian bersama dalam perayaan sebuah hari raya agama, dapat terwujud secara harmonis.

Pentingnya toleransi ini tidak terlepas dari keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut penduduk Bali. Berdasarkan data statistik Kementerian Agama RI pada 2018, jumlah pemeluk agama di Bali terdiri atas 3.682.484 beragama Hindu, 425.981 beragama Islam, 65.962 beragama Kristen, 33.352 beragama Katolik, 28.635 beragama Buddha, 470 beragama Konghucu, dan 99 penghayat kepercayaan (Kementerian Agama RI, 2018).

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep toleransi. Menurut Rumidan Rabi'ah dkk. (2011, pp. 26–29), toleransi dibutuhkan untuk mendukung keberagaman atau pluralisme. Model toleransi yang selama ini tampak adalah *modus vivendi*, yaitu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam persetujuan hitam di atas putih. Meski terlihat baik, model toleransi ini dinilai belum menyentuh makna toleransi sesungguhnya, yaitu membangun rasa saling percaya di antara pelbagai kelompok (*mutual trust*). Akan tetapi, model toleransi *modus vivendi* tetap dibutuhkan sebagai langkah awal membangun *mutual trust* tersebut.

Usaha toleransi, selain untuk merawat keberagaman, juga dilakukan untuk meredam konflik antarumat beragama. Potensi konflik antarumat beragama di Indonesia sangat besar, terutama dalam periode kontemporer, terutama memasuki abad ke-21. M. Atho Mudzhar (2003, p. 16) menyebut bahwa potensi ini terlihat dari cara penghayatan dan pandangan ideologis yang terkandung dalam masing-masing agama terkait dengan pluralisme dan konflik sosial. Ada pandangan sekularisme yang kompatibel dengan pluralisme, tetapi tidak mendorong umat menjadi penganut agama yang baik. Di sisi lain, ada pula pandangan fundamentalis yang mendorong umat menjadi penganut agama yang baik, tetapi tidak kompatibel dengan pluralisme. Oleh sebab itu, jalan tengah yang dapat diambil adalah perlunya didorong pandangan yang mengedepankan pemahaman agama yang baik dalam tataran substantif dan pada waktu yang sama kompatibel terhadap pluralisme.

Potensi ini telah terlihat dalam beberapa konflik komunal di Indonesia pada awal abad ke-21, seperti konflik di Maluku, Poso, dan Kalimantan sepanjang 1998-2002 (Tomagola, 2003, pp. 41–43). Selain itu, konflik amuk massa juga terjadi di Tegal, Pasaman, Aceh, hingga Irian Jaya pada periode yang sama. Konflik-konflik ini pada awalnya tidak terlepas dari rezim otoriter Orde Baru. Ketika reformasi lahir pada 1998, kebebasan disalahartikan sebagai ancaman bagi sesama warga negara. Oleh sebab itu, konflik justru merebak pada periode ini. Ironisnya, “agama” ikut berperan menciptakan dan mengembangkan anarkisme dari konflik. Stigma negatif atas suku, agama, ras, dan golongan justru makin kentara (A’la, 2002, pp. 20–25).

Fenomena di atas justru menunjukkan sisi ironis dari pluralisme. Oleh sebab itu, dialog untuk penyadaran diri dan pengembangan tanggung jawab harus dilakukan untuk memulihkan krisis dan konflik. Upaya dialog antarumat beragama ini justru harus direkonstruksi sehingga tidak sekadar menjadi dialog yang sarat dengan nuansa formalitas, melainkan juga dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk yang konkret dan praktis (A’la, 2002, pp. xiii–xiv; Hasyim, 2001, pp. 68–69). Ruslani (2001, p. 146) menegaskan dialog ini

harus dilaksanakan berdasarkan solidaritas historis dan integrasi sosial sehingga pandangan inklusif dan terbuka dapat tercipta bagi umat beragama di Indonesia.

Bentuk kerja sama dan toleransi antarumat beragama di Bali telah terjalin sejak masa lampau. Umat Kristen Katolik telah menjalin dialog dengan umat Hindu dengan berbagai bentuk, salah satunya pengadaptasian budaya Bali ke dalam praktik peribadatan (inkulturasi) serta pertemuan pastoral lintas agama (Mariatma, 1983, pp. 166–172). Di sisi lain, praktik akulturasi ini juga telah dilakukan oleh umat Islam di Bali, seperti pembangunan masjid yang berornamen khas Bali (Couteau, 1996, pp. 285–286). Akan tetapi, relasi yang harmonis ini sempat kacau pada awal abad ke-21, terutama ketika Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005) menjadi tragedi tak terlupakan yang mengguncang Bali, Indonesia, dan dunia internasional pada saat itu. Akibatnya, sentimen “non-Bali” dan “non-Hindu” cukup kuat serta toleransi antarumat beragama di Bali menjadi renggang (Wildaniyati & Sunaryo, 2018, pp. 129–130).

Oleh sebab itu, ancaman terhadap kerukunan umat beragama di Bali masih terlihat pada awal abad ke-21. Dialog menjadi jalan keluar untuk membendung ancaman konflik sosial tersebut. Dengan demikian, menjadi menarik dan penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan bentuk toleransi antara umat Islam, Kristiani, dan Hindu di Bali pada periode kontemporer, yang salah satunya dapat terlihat dalam perayaan hari raya Nyepi.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah bentuk toleransi atas kehidupan umat beragama di Bali dalam perayaan hari raya Nyepi pada awal abad ke-21 beserta alasan dan dampaknya. Rumusan masalah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, apa saja bentuk toleransi atas kehidupan umat beragama di Bali dalam perayaan hari raya Nyepi pada awal abad ke-21? *Kedua*, mengapa hal itu terjadi dan apa dampak dari bentuk toleransi atas kehidupan umat beragama di Bali dalam perayaan hari raya Nyepi pada awal abad ke-21?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan secara historis bentuk-bentuk toleransi atas kehidupan umat beragama di Bali dalam perayaan hari raya Nyepi pada awal abad ke-21 beserta alasan dan dampaknya.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait perayaan hari raya Nyepi di Bali. Syamsudduha Saleh (2013) melihat Nyepi sebagai salah satu wahana kerukunan antarumat beragama di Denpasar. Hal ini juga dibahas oleh I Nengah Punia, Ni Luh Nyoman Kebayantini, dan Wahyu Budi Nugroho (2018) yang mengambil studi kasus di Kampung Muslim Al-Amin, Denpasar. Di sisi lain, studi kritis dikerjakan oleh Cahyo Pamungkas (2014) yang melihat dinamika toleransi antarumat beragama di Buleleng. Tidak selamanya praktik toleransi berjalan mulus, termasuk dalam perayaan hari raya Nyepi.

Di samping itu, kajian tentang Bali secara umum yang juga membahas hari raya Nyepi. Beberapa di antaranya ditulis oleh Fred B. Eiseman (1994) yang mengulas kebudayaan dan masyarakat Bali secara umum, termasuk hari raya Nyepi. Nyoman S. Pendit (2001) menegaskan Nyepi sebagai wahana toleransi dan kerukunan, baik di tingkat regional maupun nasional. Kajian terbaru oleh Michel Picard (2020) memosisikan Nyepi sebagai salah satu bentuk tarik-ulur kepentingan politik-kultural di tingkat regional dan nasional.

Berdasarkan sejumlah kajian di atas, topik bentuk toleransi antara umat Islam dan Kristiani dalam perayaan hari raya Nyepi belum diangkat secara lebih mendalam. Tulisan ini merupakan kajian awal untuk mengangkat topik tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan metode penelitian sejarah yang menekankan studi pustaka. Sumber primer dalam penelitian ini adalah surat kabar sezaman, baik berbentuk fisik maupun digital, seperti *Antara*, *Bali Post*, *Detik*, *Lensa Indonesia*, *Metro Bali*, *Okezone*, *Tempo*, *Tribun News*, *Radar Bali*, *Republika*, dan *UCA News*, serta surat keputusan atau publikasi resmi pemerintah periode 2001-2021. Selain itu, beberapa literatur dan wawancara digunakan sebagai sumber sekunder untuk mendukung argumentasi dan interpretasi atas sumber primer.

Menurut H. Hadari Nawawi (2019, pp. 85–87), terdapat tiga proses penting dalam metode penelitian historis, yaitu pengumpulan data dan pembedaannya dalam kategori sumber primer dan sumber sekunder; kritik terhadap sumber, baik internal maupun eksternal; dan penyusunan atau pengorganisasian hasil penelitian. Dalam tahap terakhir ini, pola berpikir analitis (menguraikan) dan sintetis (menyatukan) digunakan. Pada akhirnya, penelitian ini merupakan penelitian kronologis dan deskriptif yang bermaksud menggambarkan dan mengungkapkan kejadian-kejadian menurut urutan waktunya. Pembahasan dalam artikel ini dimulai dari 2001, 2004, 2005, 2008, 2012, dan berakhir pada 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Toleransi Kehidupan Umat Beragama di Bali dalam Perayaan Hari Raya Nyepi pada Awal Abad XXI

Sepanjang abad ke-21, hari raya Nyepi dirayakan pada hari yang beragam. Tidak jarang, sepanjang 21 tahun terakhir, hari raya Nyepi dirayakan pada hari Jumat yang merupakan hari beribadah umat Islam dan hari Minggu yang merupakan hari beribadah umat Kristiani, baik Kristen maupun Katolik. Jika ditelusuri lebih lanjut, sepanjang 21 tahun terakhir ini, hari raya Nyepi jatuh pada hari Minggu pada tiga tahun, yaitu 2001, 2004, dan 2021. Serupa dengan hal itu, hari raya Nyepi jatuh pada hari Jumat juga pada tiga tahun, yaitu 2005, 2008, dan 2013.

Menindaklanjuti fenomena ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota se-Bali, selalu mengundang seluruh perwakilan umat beragama untuk menyosialisasikan *catur brata penyepian* dan membahas kemungkinan timbulnya masalah dari kegiatan besar tersebut. Kemungkinan ini tidak lain adalah pelaksanaan dua hari raya keagamaan yang berbeda, entah itu antara umat Islam dan Hindu (jika hari raya Nyepi jatuh pada hari Jumat) dan antara umat Kristiani dan Hindu (jika hari raya Nyepi jatuh pada hari Minggu) (Segara, 2019, p. 110).

Pada 2001 hari raya Nyepi jatuh pada Minggu, 25 Maret 2001. Harian *Bali Post* memberitakan bahwa umat Kristen Protestan

memajukan ibadahnya ke hari Sabtu, 24 Maret 2001. Kebijakan serupa dilakukan oleh Gereja Katolik. Menariknya, inisiatif ini lahir sebagai wujud toleransi, meski tidak ada larangan untuk menyelenggarakan ibadah hari Minggu. “Meski tidak ada larangan menyelenggarakan ibadah pada hari Minggu—saat Nyepi—kami memilih menyelenggarakan pada Sabtu. Pasalnya, tidak semua jemaat gereja ini memiliki kendaraan dan kediamannya dekat dengan gereja. Kami tidak ingin menjadi ‘batu sandungan’ bagi umat lain. Sebab, iman yang benar, tidak membuat ketersinggungan dengan lingkungan, tetapi kedamaian,” ungkap opsir/pengurus Gereja Kristen Bala Keselamatan Kapten Wayang Seneng (Anonim, 2001).

Ungkapan toleransi ini juga terulang pada Minggu, 21 Maret 2004. Menariknya, hari raya Nyepi tidak hanya dirayakan bersamaan dengan hari ibadah umat Kristiani, tetapi juga dalam suasana kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2004. Sebagai pilpres pertama setelah Reformasi 1998, suasana kampanye politik dikhawatirkan dapat mengganggu kekhidmatan hari raya Nyepi. Oleh sebab itu, hal ini diantisipasi melalui dialog jauh-jauh hari, salah satunya di Kabupaten Badung oleh Bupati A.A. Ngurah Oka Ratmadi (Anonim, 2004).

“Bupati Ratmadi mengatakan pada masa kampanye dan hari raya Nyepi bagi umat Hindu juga saat bersamaan umat lain mengadakan kebaktian, maka perlu rasa toleransi antarumat beragama. Untuk itu, temu dialog perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat memperkecil kesenjangan dan ketersinggungan yang kerap kali sering memicu terjadinya perpecahan antarumat,” demikian tulis harian *Bali Post* (Anonim, 2004).

Bentuk toleransi yang tercapai adalah umat Kristen Katolik memajukan ibadah dengan menyelenggarakannya pada hari Sabtu. Selain itu, umat Kristen Protestan yang berdekatan dengan gereja melaksanakan kebaktian hari Minggu pada pagi hari pukul 05.00 atau sebelumnya sudah berada di rumah pukul 06.00 dan tidak menggunakan kendaraan bermotor (Anonim, 2004).

Selanjutnya, pada 2005, 2008, dan 2012, hari raya Nyepi jatuh pada hari Jumat, yaitu pada

Jumat, 11 Maret 2005; Jumat, 7 Maret 2008; dan Jumat, 23 Maret 2012. Dilansir dari harian *Tempo*, bentuk toleransi yang dicapai adalah umat Islam tetap diizinkan menunaikan salat Jumat dengan catatan sebagai berikut. *Pertama*, tidak menggunakan pengeras suara ke luar masjid atau cukup menggunakan pengeras suara ke dalam masjid. *Kedua*, umat menunaikan salat di masjid terdekat sehingga perjalanan dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan. Bentuk toleransi antara umat Islam dan umat Hindu dalam perayaan hari raya Nyepi dapat tercapai setelah adanya dialog yang hasilnya dituangkan dalam wujud Seruan Bersama oleh Lembaga-lembaga Umat Beragama Provinsi Bali (Hasan, 2005).

Pada perayaan hari raya Nyepi Tahun Saka 1927 (11 Maret 2005), harian *Tempo* mencatat bahwa umat Islam lebih memilih untuk tidak pergi ke masjid demi menghormati pelaksanaan hari raya Nyepi. Padahal, mereka diizinkan untuk menunaikan ibadahnya di masjid sesuai ketentuan yang ada. Selain itu, masjid-masjid juga lebih memilih tidak menggunakan pengeras suara dan tidak mengumandangkan azan sebagai bentuk toleransi dengan saudaranya umat Hindu (Mustika, 2005).

Pada perayaan hari raya Nyepi Tahun Saka 1930 (7 Maret 2008), hal serupa juga terjadi. Harian *Antara* mencatat bahwa proses Jumatan oleh umat Islam berjalan dengan lancar, salah satunya di Kampung Jawa, Denpasar, yang merupakan komunitas muslim terbesar tidak hanya di Denpasar, tetapi juga di Bali. Sekitar 10 ribu jemaah melangsungkan salat Jumat hingga meluber ke jalan-jalan karena kapasitas masjid berlantai tiga itu penuh oleh jemaah. Selama Jumatan tersebut, mereka dapat melaksanakan ibadahnya dengan khidmat tanpa mengganggu kekhidmatan perayaan hari raya Nyepi oleh umat Hindu. Selain itu, petugas keamanan desa adat (pecalang) juga membantu mengamankan dan tidak melarang umat untuk beribadah meski jarak yang ditempuh cukup jauh (Bambang, 2008a).

Meski secara umum berjalan lancar, terdapat satu kendala bagi umat di Banjar/Dusun Tegal Kori, Denpasar Barat. Mereka kesulitan mendatangkan juru dakwah atau khatib yang berasal dari penduduk setempat karena biasanya

khatib didatangkan dari daerah lain. Oleh sebab itu, Ketua Kerukunan Warga Muslim Banjar Tegal Kori, Alit Sujana, menjadi khatib sekaligus imam bagi sekitar 40 warga muslim setempat. Menurut Heri Sukarmeni, tokoh Islam setempat, hal ini diharapkan mendapat toleransi ke depannya agar khatib dapat didatangkan dari daerah lain (Bambang, 2008a).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perayaan hari raya Nyepi yang berbarengan dengan ibadah salat Jumat di Kampung Jawa berjalan dengan lancar. Menariknya, aktivitas masyarakat di sana sepanjang hari juga demikian. Harian *Antara* mencatat bahwa masyarakat sudah “terbiasa” dengan hari raya Nyepi. Tidak hanya pemberian izin beribadah, masyarakat setempat juga diizinkan untuk membuka toko atau warung, meski tidak terang-terangan. Selain itu, anak-anak juga dapat bermain di gang-gang dan jalan. Pada intinya, sejumlah pekalang tetap mengamankan dan mengimbuu masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu umat Hindu yang sedang menjalankan *catur brata penyepian* (Bambang, 2008b).

Pada tahun itu, terdapat satu hal yang menarik. Tidak hanya umat Islam yang merayakan hari ibadahnya bersamaan dengan hari raya Nyepi. Umat Katolik pada saat itu juga merayakan hari ibadahnya mengingat tanggal perayaan hari raya Nyepi bertepatan dengan hari Jumat pertama dalam bulan. Umat Katolik memiliki tradisi untuk melangsungkan ibadah setiap Jumat pertama yang dipersembahkan kepada Hati Kudus Yesus. Ditambah lagi, pada saat itu umat Katolik sedang memasuki masa Prapaskah dan setiap Jumat mereka mengikuti ibadah “Jalan Salib” (Anonim, 2008).

Meskipun demikian, umat Katolik tidak beribadah ketika Jumat pertama bersamaan dengan hari raya Nyepi. Kebijaksanaan yang diambil Gereja Katolik di Bali adalah memajukan hari ibadah ke hari Rabu atau Kamis sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Pastor Yosef Wora, SVD, Administrator Diosesan Denpasar pada 20 Februari 2008. Tujuannya tidak lain adalah menghormati umat Hindu yang akan merayakan hari raya Nyepi. “Penyesuaian ini bertujuan untuk menghormati umat Hindu setempat,” ujarnya (Anonim, 2008).

Salah satu penerapan kebijakan tersebut adalah Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka. Paroki ini menyelenggarakan misa Jumat pertama ditambah dengan ibadah Jalan Salib pada hari Kamis. Paroki ini terletak di Desa Tuka yang mayoritas penduduk orang Bali beragama Katolik berjumlah 120 keluarga, berdampingan dengan 40 keluarga Hindu, 15 keluarga Islam, dan 14 keluarga Kristen. Pastor Kristianus Ratu, pastor paroki tersebut, menyebut bahwa Gereja tidak melaksanakan misa pada perayaan hari raya Nyepi (Anonim, 2008).

Empat tahun kemudian, tahun baru Saka sekaligus hari raya Nyepi juga jatuh pada hari Jumat, yaitu 23 Maret 2012. Oleh sebab itu, sebelum hari H perayaan, sejumlah pemangku kepentingan duduk bersama untuk mencapai kesepakatan bersama demi terciptanya toleransi yang harmonis. Harian *Metro Bali* menyebut, pemerintah di Badung menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Badung A.A. Gde Agung dan dihadiri oleh sejumlah pihak, seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Camat se-Badung, Ketua Majelis Madya, Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Badung, Ketua Majelis Alit Kecamatan, dan Bendesa Adat se-Badung (Sutiawan, 2012).

Dalam pertemuan tersebut, seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Badung adalah pelaksanaan ibadah Jumatan dimulai pukul 11.30 hingga 13.30 WITA dengan tertib, tanpa menggunakan pengeras suara, dan sedapat mungkin mencari tempat ibadah yang dekat dengan tempat tinggalnya sehingga tidak perlu menggunakan kendaraan (Sutiawan, 2012).

Tidak hanya di Badung, rapat koordinasi juga diselenggarakan di Denpasar. Mengutip harian *Republika*, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Denpasar, Ida Bagus Rahoela, menyebut bahwa perlunya upaya seluruh warga masyarakat untuk bisa saling memahami dan menghormati saat hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934 yang bersamaan dengan kewajiban menunaikan salat Jumat bagi umat Islam. Koordinasi tidak hanya terjadi pada

tingkat atas, tetapi juga melibatkan unsur desa atau kecamatan. Tokoh-tokoh agama didorong untuk membicarakan hal ini sejak dini agar pelaksanaan ibadah masing-masing umat dapat berjalan dengan lancar (Baraas, 2012).

Mengutip *Lensa Indonesia*, hasil dari pembicaraan ini adalah seruan bersama yang ditandatangani oleh I Nyoman Kenak (PHDI Kota Denpasar), K.H. Mustafa al-Amin (MUI Kota Denpasar), Rm. Yosef Wora, SVD (Keuskupan Denpasar), I Ketut Sukanada (Musyawarah Pelayanan Agama Kota Denpasar), Putu Santiro (Majelis Agama Konghucu Kota Denpasar), Walubi Kota Denpasar, Majelis Madya Desa Pakraman, FKUB Kota Denpasar, Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Denpasar, dan Kementerian Agama Kota Denpasar. Dalam seruan tersebut, umat Hindu diharapkan mampu melaksanakan *catur brata penyepian* dengan sebaik-baiknya. Selain itu, umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu menyesuaikan. Bagi umat Islam, ibadah salat Jumat tetap diizinkan dengan catatan seperti yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya (Rosdiansyah, 2012).

Pada hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934, ibadah salat Jumat oleh umat Islam berjalan dengan lancar. Harian *Detik* memberitakan bahwa umat Islam di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, mulai mendatangi masjid pada pukul 12.00 WITA untuk menunaikan salat Jumat. Sejumlah pecalang juga mengawal jemaah yang datang ke masjid di kawasan Jimbaran. Meskipun demikian, satu perbedaan terlihat pada perayaan tahun tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pendataan jemaah yang akan mengikuti salat Jumat. Hal ini dilakukan pecalang untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan mengingat salah satu teroris bernama Anang yang tewas ditembak beberapa hari sebelumnya bertempat tinggal di Jimbaran (Anonim, 2012).

Bentuk toleransi demikian juga terlihat di Kampung Islam Kusamba, Klungkung. Meski masyarakat mayoritas beragama Islam, mereka mampu hidup berdampingan dengan umat Hindu. Warga kampung menghormati umat Hindu yang sedang merayakan hari raya Nyepi dengan tidak ke luar rumah, tidak gaduh, dan

tidak menyalakan lampu. Suara *bedug* dihentikan sementara. Ketika hari raya Nyepi jatuh pada hari Jumat, mereka dengan leluasa tetap menunaikan salat Jumat di masjid. Umat Hindu memaklumi umat Islam yang pergi ke luar rumah untuk salat Jumat. Umat Islam juga tidak menggunakan pengeras suara ke luar, tetapi hanya terdengar di dalam (Dwipayana, 2012, p. 79).

Selain itu, di Desa Pegayaman, Buleleng, masyarakat telah mengedepankan konsep saling menjaga dan mengerti, terutama dalam hal aktivitas spiritual. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, ketika hari raya Nyepi jatuh pada hari Jumat, mereka dengan kesadarannya melaksanakan salat dengan menuju masjid terdekat. Mereka tidak akan memilih untuk sengaja mencari masjid lain yang jauh sebagai alasan agar dapat keluar pada saat hari raya Nyepi (Suwindia, 2013, pp. 195–196).

Sembilan tahun kemudian, perayaan hari raya Nyepi jatuh pada hari Minggu, 14 Maret 2021. Oleh sebab itu, hal ini perlu disikapi oleh pemuka dan umat Kristiani, baik umat Kristen maupun umat Katolik. Pemerintah telah mengundang segenap pemangku kepentingan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk membicarakan hal ini, terutama bagi umat Kristiani yang akan menjalani ibadahnya. Pembicaraan ini bermuara pada seruan bersama. Terkait ibadah umat Kristiani, dalam seruan bersama tersebut termaktub bahwa umat Katolik diperkenankan melaksanakan peribadatan/misa pada hari Sabtu (13 Maret 2021) dan umat Kristen diperkenankan melaksanakan kebaktian di gereja terdekat pada hari Minggu pukul 00.00 WITA dan berakhir sebelum pukul 06.00 WITA saat umat Hindu mulai melakukan *catur brata penyepian* (Indonesia, 2021).

Musyawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) Kabupaten Buleleng, misalnya, menyiapkan skema ibadah bagi umat. Pendeta Putu Yosa Yogiarta, Ketua MPUK Buleleng, menyebut bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan MPUK Bali terkait skema tersebut mengingat jemaat tidak akan bisa pergi ke gereja pada hari Minggu. Di samping itu, hasil kesepakatan dengan MPUK Bali telah disampaikan kepada FKUB Buleleng dan jemaat gereja (Prasetya, 2021).

Umat Kristiani pada dasarnya sangat mengapresiasi hari raya Nyepi oleh umat Hindu. Oleh sebab itu, MPUK Buleleng menganjurkan hari ibadah dapat dipindahkan dari hari Minggu ke hari Sabtu. Apabila ibadah tidak dapat dilaksanakan pada hari Sabtu, gereja dianjurkan untuk merekam proses ibadah dan khotbah. Dengan demikian, jemaat dapat melakukan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing. Selain itu, jemaat juga dapat mengikuti ibadah secara daring sesuai dengan denominasi masing-masing gereja. Meskipun demikian, ibadah daring ini pun juga sangat opsional mengingat jaringan internet dimatikan pada hari raya Nyepi (Prasetya, 2021).

Alternatif lain yang ditawarkan adalah pelaksanaan ibadah di gereja pada hari Minggu mulai pukul 00.00 hingga 05.00 WITA. Pendeta Yogiarta menilai bahwa hal tersebut tidak efektif karena dapat memicu suasana yang tidak kondusif. Oleh sebab itu, anjuran yang paling tepat adalah memindahkan hari ibadah ke hari Sabtu. Ia pun menandakan bahwa hal itu tidak akan mengurangi makna dari ibadah tersebut (Prasetya, 2021).

Di Denpasar, alternatif pemindahan hari ibadah juga dilakukan di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Amanat Agung Bali. Pendeta GKKD, Paulus W.S.H. Sanger menyebut bahwa ibadah gereja mereka di Ruko Sudirman Agung Jalan P.B. Sudirman Denpasar juga dimajukan ke hari Sabtu pukul 19.30 hingga 21.30 WITA. Hal ini merupakan wujud ketaaatan gereja atas seruan pemerintah. Keputusan ini telah diumumkan pada ibadah Minggu, 7 Maret 2021, dan dalam grup *WhatsApp* gereja sehingga dapat diketahui umat (Amurwonegoro, 2021).

Pemuka agama Katolik juga bersikap serupa. Dilansir dari *Tribun News*, Mgr. Dr. Silvester San selaku Uskup/Pemimpin Gereja Katolik Denpasar (Bali-NTB) memberikan arahan untuk memajukan atau memindahkan hari ibadah dari hari Minggu ke hari Sabtu. Dengan demikian, ibadah atau misa dilaksanakan pada hari Sabtu dengan jam yang sama dengan misa pada hari Minggu (Amurwonegoro, 2021).

Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, misalnya, menjalankan arahan Uskup Denpasar ini dengan menyelenggarakan misa pada hari

Sabtu, 13 Maret 2021 dengan jam yang sama dengan hari Minggu, yaitu pukul 06.30 WITA, 09.30 WITA, 15.00 WITA, dan 18.00 WITA. Misa ini juga disiarkan secara langsung (*live streaming*) sehingga umat dapat mengikuti secara daring. Ketua II Bidang Aksi Kemasyarakatan Dewan Pastoral Paroki (DPP) Katedral Denpasar sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Gereja Katedral Denpasar, Vitalis Alexander, menyebut bahwa hal itu telah sesuai dengan arahan Uskup Denpasar dan telah dipertimbangkan dari sisi liturginya. Selain itu, umat juga diimbau untuk terus menaati protokol kesehatan baik di gereja maupun di luar gereja (Amurwonegoro, 2021).

Arahan Uskup Denpasar untuk menutup gereja pada Minggu, 14 Maret 2021 dan memindahkan hari ibadah pada Sabtu, 13 Maret 2021 merupakan bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang merayakan hari raya Nyepi. “Kami tahu pentingnya hari ini bagi saudara-saudari Hindu kami, jadi kami juga harus menghormati ini,” ujar Uskup San (Epa, 2021).

Hal ini pun tidak dianggap sebagai masalah yang berarti. “Ini contoh kerja sama antaragama. Ini adalah hari istimewa dalam kalender Hindu setempat. Hari itu untuk umat Hindu,” ujar Pastor Laurentius Ketut Supriyanto di Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka, Badung. Pendapat serupa juga diutarakan oleh Vincensius Raga, seorang umat Katolik di Denpasar. “Ini tidak mengurangi kesucian misa,” katanya sebagaimana dilansir dari *UCA News* (Epa, 2021).

Alasan dan Dampak Toleransi Kehidupan Umat Beragama di Bali dalam Perayaan Hari Raya Nyepi pada Awal Abad XXI

Hari raya Nyepi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan hari toleransi. Setiap tahunnya, para pemuka agama dan pemangku kepentingan duduk bersama agar perayaan ini dapat berjalan dengan khidmat dan umat beragama lain merasa nyaman menyikapi perayaan tersebut. Syamsudduha Saleh (2013, p. 173) menyebut bahwa hal ini tercapai karena semua pihak saling menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Dengan kata lain, menerima perbedaan berarti adanya itikad baik untuk hidup bersama dan berdampingan dalam kebersamaan dan kesetaraan.

Menurut P. Paskalis Nyoman Widastra, SVD, seorang imam Katolik dan pemerhati budaya Bali, Gereja Katolik mengambil sikap untuk memajukan hari ibadah ke hari Sabtu ketika hari raya Nyepi jatuh pada hari Minggu dengan dua dasar yang kuat, yaitu dasar teologis dan dasar pastoral. Dasar teologisnya adalah misa atau perayaan Ekaristi adalah perintah Gereja yang harus dilaksanakan dalam keadaan apa pun setiap hari Minggu dan hari-hari raya. Apabila keadaan tidak memungkinkan, dasar pastoral turut berlaku. Uskup sebagai pemegang otoritas Gereja berwenang untuk mengeluarkan kebijakan pastoral, salah satunya memindahkan hari ibadah ke hari Sabtu. Bahkan, praktik beribadah pada Sabtu (*sore*) sejatinya secara teologis memiliki kedudukan yang sama dengan misa Minggu (Wawancara, 21 Februari 2021).

Lebih lanjut, praktik toleransi yang telah terjadi ini merupakan salah satu sikap Gereja untuk hadir dan membawa kedamaian di tengah masyarakat yang beragam. Dalam konteks di Bali, Gereja Katolik memahami agama Hindu adalah sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga perlu mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk oleh Gereja. Oleh sebab itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya, forum para pemuka agama selalu diselenggarakan sebelum hari raya Nyepi untuk duduk bersama dan memutuskan bersama hal-hal yang mendukung pelaksanaan hari raya Nyepi yang “unik” tersebut. Dalam hal ini, Gereja menyampaikan pandangannya dan menerima bentuk toleransi yang telah ditetapkan untuk kemudian ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada umat (Wawancara, 21 Februari 2021).

Satu hal yang menarik dan perlu digarisbawahi adalah meski umat Katolik tergolong minoritas di Bali, hal ini tidak berlaku di sejumlah tempat, salah satunya di Desa Palasari. Desa yang hampir seluruh penduduknya merupakan orang Bali beragama Katolik ini tetap mengedepankan toleransi ketika hari raya Nyepi jatuh pada hari Minggu. Dalam konteks ini, uskup memberikan kebijakan untuk tetap mengizinkan misa pada hari Minggu, dengan catatan telah didiskusikan sebelumnya dengan pengurus desa adat. Meskipun demikian, pengurus dan umat Gereja Katolik di Palasari tetap memilih untuk memindahkan hari ibadah ke

hari Sabtu sesuai kebijakan yang berlaku secara umum di Bali (Wawancara, 21 Februari 2021).

Bentuk toleransi yang dicapai ini adalah salah satu upaya Gereja membangun komunikasi dan kerja sama demi kebaikan kita bersama (*bonum commune*). Toleransi dalam tataran formal berupa seruan bersaka dan tataran kehidupan sosial harus berjalan bersama-sama. Menurut P. Paskalis, kedua hal ini sama pentingnya sebab “toleransi harus dipahami sebagai pembelajaran terus-menerus dengan dasar cinta kasih yang mempersatukan kita sebagai sesama umat manusia” (Wawancara, 21 Februari 2021).

Akhirnya, Gereja Katolik berusaha hadir di tengah masyarakat dengan cara yang “fleksibel” meski tetap harus memperjuangkan imannya. Nas “kita harus tulus seperti merpati, tetapi juga harus cerdik seperti ular” dalam Kitab Suci menjadi ilham Gereja dalam membangun toleransi tersebut. Ketulusan adalah hal kunci. Oleh sebab itu, apresiasi dari umat beragama lain tidak lain merupakan “bonus” atas toleransi sebagai “salah satu bentuk cinta kasih Gereja kepada sesama” (Wawancara, 21 Februari 2021).

Sebuah perspektif menarik juga diutarakan oleh Ida Bagus G. Wiyana, pemuka agama Hindu dalam FKUB. Mengutip *UCA News*, ia menyebut bahwa sekalipun Nyepi merupakan hari raya umat Hindu, pemuka agama Hindu tidak melarang seluruh aktivitas beribadah umat beragama lain karena mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian. “Meskipun umat Hindu merupakan mayoritas, keberadaan umat beragama lain tidak dapat diingkari begitu saja. Oleh sebab itu, untuk menjalin kehidupan yang harmonis, kita harus menunjukkan toleransi dan rasa saling menghormati satu sama lain,” ujarnya (Anonim, 2008).

Di satu sisi, umat Hindu memberikan “kebesaran hati” dalam peringatan hari raya mereka. Di sisi lain, umat Islam dan Katolik dapat menyesuaikan diri tanpa mengurangi makna dari ibadah mereka, secara khusus pada hari Jumat pertama, 7 Maret 2008. Oleh sebab itu, Wiyana mengapresiasi bentuk toleransi ini. “Kami umat Hindu sangat mengapresiasi sikap ini, dan kami sangat bersyukur,” ungkapnya (Anonim, 2008).

Toleransi yang tercapai tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Bupati Badung, misalnya, menyebut bahwa “Perayaan hari suci Nyepi yang bersamaan dengan hari suci umat Islam hendaknya kembali menjadi momentum untuk lebih memantapkan rasa persaudaraan, toleransi kehidupan antarumat beragama” (Sutiawan, 2012).

Selain itu, pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada umat Hindu di Bali atas toleransi pada perayaan hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934. Dilansir dari *Okezone*, Ketua Umum PBNU, K.H. Said Aqil Siroj di Jakarta berujar, “Saya secara pribadi dan atas nama PBNU menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Kami sangat mengapresiasi. Ini contoh yang baik dalam kehidupan berbangsa dengan beragam agama dalam masyarakatnya.” Ia pun berharap toleransi serupa terjadi di daerah lain, saat umat Islam menjadi minoritas (Diputra, 2012).

Meski gambaran di atas menunjukkan hal positif dari toleransi, terdapat pula dampak negatif ketika toleransi ini tidak dapat dijalankan oleh kedua belah pihak. Indriana Kartini (2011, p. 137) menyebut bahwa di beberapa tempat, seperti Desa Tegallinggah, Buleleng, kesalahpahaman justru terjadi. Misal, pawai *ogoh-ogoh* pada satu hari menjelang hari raya Nyepi dilakukan hingga di pelataran masjid sehingga menimbulkan bentrokan antarpemuda berlainan agama.

Di Jembrana, kasus kesalahpahaman serupa juga terjadi pada saat perayaan hari raya Nyepi berbarengan dengan hari raya Idulfitri. Ketika umat Hindu menghendaki suasana yang sunyi, umat Islam melakukan takbir yang menggunakan pengeras suara. Oleh sebab itu, bentuk penyelesaiannya adalah takbiran tetap diperbolehkan dengan dikawal dan terbatas di daerah yang mayoritas beragama Islam, seperti Desa Loloan (Kartini, 2011, p. 138).

Situasi sebaliknya justru dialami oleh masyarakat di Kampung Keramas, Gianyar. Kampung Muslim ini cukup “istimewa”, sebab mereka masih dapat menjalankan aktivitasnya dan patroli pecalang tidak sampai masuk ke kampung tersebut. Akan tetapi, kampung Muslim lain di Gianyar, seperti di Semebaung

atau Ubud, mengalami situasi yang jauh berbeda. Bahkan, tidak jarang warga “melawan” dengan menghalangi pecalang masuk ke kampung mereka. Sebagaimana di daerah lain, mereka juga dilarang untuk menggunakan kendaraan untuk pergi ke masjid. Karena jarak masjid dengan tempat tinggal mereka cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki, tidak sedikit dari mereka akhirnya dapat tidak menunaikan salat Jumat (Basyar, 2010, pp. 32, 35–36).

Kesalahpahaman demikian dapat terjadi ketika kesepakatan bersama atau toleransi tidak disosialisasikan secara menyeluruh. Cahyo Pamungkas (2014, pp. 295–296) menyebut bahwa kesepakatan yang tertuang dalam seruan bersama seringkali dianggap sebatas kesepakatan para elite atau pemuka agama dan sulit disosialisasikan di tingkat bawah atau akar rumput. Ia mengambil contoh bahwa pada hari raya Nyepi, umat Islam bersikeras untuk tetap mengumandangkan azan melalui pengeras suara. Di sisi lain, umat Hindu merasa berkeberatan ketika umat Islam menyalakan lampu.

Dalam wawancaranya terhadap Ketua MUI Provinsi Bali, terungkap bahwa umat Islam memberikan toleransi terhadap umat Hindu “kalau boleh dikatakan dipaksa”. Alasannya sebagaimana disampaikan di atas, yaitu kesepakatan untuk bekerja sama antarumat beragama yang berada di tingkat elite seringkali belum menyentuh ke lapisan generasi muda yang kadang-kadang memiliki pemikiran yang berbeda (Pamungkas, 2014, p. 305).

Meskipun demikian, pada akhirnya, ia menyebut bahwa hubungan antarumat beragama, dalam kasus ini umat Islam dan Hindu, dapat berlangsung dengan damai karena para pemimpin agama dapat berdialog untuk menyelesaikan ketegangan-ketegangan antarumat beragama yang muncul di tengah banyaknya gangguan dalam toleransi beragama. (Pamungkas, 2014, pp. 311–312). Kesimpulan ini senada dengan apa yang dituliskan oleh Putu Setia (2014, p. 373), bahwa “*nyama selam* (umat Islam), *nyama kristen* (umat Kristen), maupun *nyama buda* (umat Buddha) di abad teknologi (kontemporer) ini tak pernah lagi konflik dengan *nyama Bali* (orang Bali). Mereka semuanya orang-orang Bali bertumpah darah Bali.”

PENUTUP

1. Simpulan

Toleransi adalah salah satu nilai tambah dalam kehidupan umat beragama di Bali. Hal ini terlihat ketika hari raya Nyepi oleh umat Hindu dirayakan bersamaan dengan hari ibadah umat Islam dan Kristiani, pada awal abad ke-21. Terhitung tiga kali hari raya Nyepi jatuh pada hari Jumat dan Minggu, yaitu pada Minggu, 25 Maret 2001; Minggu, 21 Maret 2004; Jumat, 11 Maret 2005; Jumat, 7 Maret 2005; Jumat, 23 Maret 2012; dan Minggu, 14 Maret 2021.

Bentuk toleransi yang dicapai meliputi tidak digunakannya pengeras suara ke luar masjid selama salat Jumat dan imbauan untuk beribadah di masjid terdekat sehingga tidak perlu menggunakan kendaraan bagi umat Islam serta memindahkan hari ibadah dari hari Minggu ke hari Sabtu bagi umat Kristen dan Katolik. Bentuk toleransi ini dapat dicapai setelah adanya musyawarah bersama para pemuka agama dan pemangku kepentingan menjelang hari raya Nyepi setiap tahunnya sehingga seruan bersama dapat menjadi kesepakatan berbagai pihak.

Bentuk toleransi demikian tidak lain menegaskan makna hari raya Nyepi sebagai hari toleransi. Hal ini mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini seringkali sebatas kesepakatan di tingkat elite yang belum mencapai akar rumput dan dapat menimbulkan kesalahpahaman hingga konflik sosial antarumat beragama. Oleh sebab itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk membumikan toleransi atas kehidupan umat beragama di Pulau Dewata ini.

2. Saran

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif atas salah satu keunikan di Pulau Bali yang menegaskan pentingnya toleransi dalam kehidupan antarumat beragama. Dengan demikian, hal ini memperkuat apa yang disebut sebagai seruan moderasi beragama dewasa ini, baik di Bali secara khusus maupun di Indonesia secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, A. (2002). *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Kompas.
- Amurwonegoro, A. (2021, 7 Maret). Gereja Katolik Katedral Denpasar Majukan Jadwal Ibadah, Bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. *Tribun News*. <https://bali.tribunnews.com/2021/03/07/gereja-katolik-katedral-denpasar-majukan-jadwal-ibadah-bertepatan-dengan-hari-raya-nyepi?page=all>
- Anonim. (2001, 23 Maret). Sabtu, Waktu Kebaktian. *Bali Post*. 10.
- Anonim. (2004, 4 Maret). FKAUB Sepakat Wujudkan "Penyepian" dan Pemilu Berkualitas. *Bali Post*. 14.
- Anonim. (2008, 11 Maret). Catholics, Muslims Adjust Friday Services To Respect Balinese Hindus' Silence. *UCA News*. https://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2008/03/12/catholics-muslims-adjust-friday-services-to-respect-balinese-hindus-silence&post_id=29454
- Anonim. (2012, 23 Maret). Nyepi, Umat Muslim di Bali Solat Jumat dengan Kawalan Pecalang. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-1875127/nyepi-umat-muslim-di-bali-solat-jumat-dengan-kawalan-pecalang>
- Bambang. (2008a, 7 Maret). Jumatan Saat Nyepi di Bali Lancar. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/95810/jumatan-saat-nyepi-di-bali-lancar>
- Bambang. (2008b, 7 Maret). Nyepi, Kampung Jawa di Bali Tetap Semarak. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/95825/nyepi-kampung-jawa-di-bali-tetap-semarak>
- Baraas, A. (2012, 7 Maret). Nyepi Jatuh di Hari Jumat, Umat Islam dan Hindu Berembuk Soal Ibadah. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/06/m0gl9s-nyepi-jatuh-di-hari-jumat-umat-islam-dan-hindu-berembuk-soal-ibadah>
- Basyar, M. H. (2010). *Identitas Minoritas di Indonesia: Kasus Muslim Bali di Gianyar*

- dan Tabanan*. Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan.
- Couteau, J. (1996). Koeksistensi Islam dan Hindu di Bali; Tinjauan Sosiologis. A. Mahasin, B. C. Syamwil, A. Awaluddin, A. Zaeni, L. Nurbaeti, R. H. Alam, & T. I. Fatah (Eds.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Nusantara*. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal.
- Diputra, R. (2012, 24 Maret). Izinkan Umat Islam Salat Jumat, PBNU Apreasiasi Umat Hindu di Bali. *Okezone*. <https://nasional.okezone.com/read/2012/03/23/337/598842/izinkan-umat-islam-salat-jumat-pbnu-apreasiasi-umat-hindu-di-bali>
- Dwipayana, A. A. G. N. A. (Ed.). (2012). *Bulan Sabit di Pulau Dewata: Jejak Kampung Islam Kusamba-Bali*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Eiseman, F. B. (1994). *Bali: Sekala & Niskala Volume I*. Singapore: Periplus Editions.
- Epa, K. (2021, 15 Maret). Bali Churches Go Quiet on Hindus' Day of Silence. *UCA News*. <https://www.ucanews.com/news/bali-churches-go-quiet-on-hindus-day-of-silence/91759>
- Hasan, R. (2005, 9 Maret). Meski Nyepi, Umat Islam Tetap Bisa Salat Jumat. *Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/nusa/35452/meski-nyepi-umat-islam-tetap-bisa-salat-jumat>
- Hasyim, S. (2001). Rumah Ibadah, Toleransi, dan Dialog Antarumat Beragama. N. Achmad (Ed.), *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Indonesia. (2021). *Seruan Bersama Majelis-Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1943*.
- Kartini, I. (2011). Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali. *Masyarakat Indonesia*, 37(2), 115–145.
- Kementerian Agama RI. (2018). Data Umat Berdasar Jumlah Pemeluk Agama Menurut Agama. <https://data.kemenag.go.id/agamashboard/statistik/umat>
- Mariatma, P. (1983). Catholic Commitment to Dialogue with Bali Hinduism. *Bulletin Pontificium Consilium pro Dialogo Inter Religiones*, 18(2), 166–172.
- Mudzhar, M. A. (2003). Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama. M. S. Isre (Ed.), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mustika, M. (2005, 11 Maret). Kala Nyepi, Bali Gelap Gulita. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/57858/kala-nyepi-bali-gelap-gulita>
- Natih, G. M. (1994). Peranan Umat Beragama dalam Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Memasuki PJP II. P. Setia (Ed.), *Dialog Nyepi 1916 Çaka: Umat Beragama dan Persatuan Bangsa*. Jakarta: Panitia Dharma Shanti Hari Raya Nyepi 1916 Çaka.
- Nawawi, H. H. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamungkas, C. (2014). Toleransi Beragama dalam Praktik Sosial: Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 9(2), 285–316. doi: 10.21274/epis.2014.9.2.285-316.
- Pendit, N. S. (2001). *Nyepi: Kebangkitan, Toleransi, dan Kerukunan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Picard, M. (2020). *Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Prasetya, E. (2021, 12 Maret). Nyepi Barengan dengan Ibadah Minggu, Ini Persiapan Umat Kristen Bali. *Radar Bali*. <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/03/12/246609/nyepi-barengan-dengan-ibadah-minggu-ini-persiapan-umat-kristen-bali>

- Punia, I. N., Kebayantini, N. L. N., & Nugroho, W. B. (2018). Nyepi di Kampung Muslim Al-Amin: Leksikon Dinamika Sosial Toleransi Beragama di Denpasar, Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 8(1), 159–180. doi: 10.24843/JKB.2018.v08.i01.p09.
- Rabi'ah, R., Prameswari, F. C., Astika, I. M., & Muthmainah, H. (2011). *Wacana Perdamaian dan Toleransi Agama-Agama di Indonesia*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Rosdiansyah. (2012, 12 Maret). Nyepi, Salat Jumat Digelar Musala Terdekat. *Lensa Indonesia*.
<https://www.lensaindonesia.com/2012/03/12/nyepi-salat-jumat-digelar-musala-terdekat.html>
- Ruslani. (2001). Dialog Antaragama. N. Achmad (Ed.), *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Saleh, S. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Denpasar Bali. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1), 167–175.
- Segara, I. N. Y. (2019). Relasi Hindu dan Islam di Bali. Kustini (Ed.), *Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Setia, P. (2014). *Bali Menggugat*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sutiawan. (2012, 1 Maret). Perayaan Nyepi Bertepatan dengan Sholat Jumat. *Metro Bali*. <http://metrobalibali.com/perayaan-nyepi-bertepatan-dengan-sholat-jumat/>
- Suwindia, I. G. (2013). *Relasi Islam dan Hindu Studi Kasus Tiga Daerah Denpasar, Karangasem, dan Singaraja Perspektif Masyarakat Multikultur di Bali*. Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Tomagola, T. A. (2003). Anatomi Konflik Komunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso, dan Kalimantan 1998-2002. M. S. Isre (Ed.), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Wawancara dengan P. Paskalis Nyoman Widastra, SVD, 21 Februari 2021.
- Wildaniyati, & Sunaryo, F. D. S. (2018). Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama Eksistensi Masyarakat Islam di Bali Pasca Bom Bali Tahun 2002-2012. *Humanis*, 22(1), 127–132. doi: 10.24843/JH.2018.v22.i01.p19.